



# **RENCANA KERJA AWAL PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027**



## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

*Jl. Soekarno-Hatta No. 7. A Telp. (0293) 789182 Fax. (0293) 788080  
Kota Mungkid 56511*

### **Tahun 2026**

## DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU .....	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	20
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...	24
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	24
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	28
	3.3. Program dan Kegiatan Prioritas Bupati.....	29
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
BAB V	: PENUTUP.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang selanjutnya disingkat Renja BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2027 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Magelang, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dan Evaluasi hasil kerja Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025.

Tahap penyusunan Renja PD Tahun 2027 dilakukan melalui 6 (enam) urutan kegiatan yaitu Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja PD Tahun 2027 telah menyesuaikan dengan terbitnya Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dilakukan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, perubahan

kebijakan dan/atau peraturan perundang- undangan.

Renja PD Tahun 2027 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang selaras dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2027 merupakan :

1. Pedoman bagi BPBD dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2027;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renja PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2027 disusun dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 687);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6) ;
  17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12):
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 109);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
  22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 76);
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD Tahun 2027 BPBD Kabupaten Magelang adalah sebagai langkah awal untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027 dan untuk mewujudkan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

Tujuan dari penyusunan Renja PD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi BPBD Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahun 2027.
2. Menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
3. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BPBD Tahun 2027.

4. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2027.
5. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Tahun 2027.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **2. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, program dan kegiatan penunjang prioritas Bupati.

##### **4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kondisi keduanya, dan tabel rencana program dan kegiatan.

##### **5. BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025 pada BPBD Kabupaten Magelang yang terdiri dari 1 urusan, dengan jumlah 2 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa :

1. Terdapat 2 program dengan predikat kinerja **sangat tinggi**, dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar  $\geq 91$  yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian 100% dan Program Penanggulangan Bencana dengan capaian 125,65%.
2. Untuk predikat kinerja keuangan terdapat 2 program dengan predikat sangat tinggi dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar 91 % yaitu :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan capaian 93,24%.
  - Program Penanggulangan Bencana dengan capaian 95,78%.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025 masuk dalam predikat kinerja Sangat Tinggi dengan nilai 112,82 % dari target 100 %, sedangkan realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 94,10 % (Sangat Tinggi).

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan secara umum terlaksana secara keseluruhan, walaupun anggaran yang tersedia kurang memadai.
2. Peran serta masyarakat dan aparatur tim pelaksana kegiatan sangat aktif.
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah, baik kebijakan/regulasi, anggaran, maupun sumber daya lainnya.
4. Koordinasi yang terpadu dan efisien antara Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait sehingga arah kebijakan sejalan dengan kebutuhan dan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif oleh semua pihak yang

terlibat.

5. Dukungan teknologi dan informasi yang memungkinkan komunikasi dan penyediaan data secara real-time;

Capaian tahun 2025 yang terdiri dari 1 urusan dan 2 program dapat terlaksana dengan baik walaupun dalam pelaksanaan kegiatan waktu pelaksanaan tidak selalu sesuai dengan yang telah di rencanakan.

Pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya adalah lebih tinggi dikarenakan tercapainya target pelaksanaan kegiatan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100 %).
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%).
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%).
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (100%).
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (100%).
6. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (100%).
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%).
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%).
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%)
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (100%)
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (100%).
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%)
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%)
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)
16. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (100%)
17. Penyusunan Rencana Kontijensi Kab/Kota (100%)

18. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota (100%)
19. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (100%)
20. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (100%)
21. Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (100%)
22. Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (100%)
23. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kab/Kota(100%)

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota (150,29%).
2. Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (120,71%).
3. Penyediaan logistikpenyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota (187,44%).

Realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (93,83%). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah belum terisinya kekosongan pejabat struktural sehingga realisasi anggaran belanja pegawai kurang dari target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Komunikasi dan koordinasi yang baik,
2. Ketersediaan dana tepat waktu,
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan.
4. Peran serta masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan sangat aktif.

Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :

1. Respon cepat terhadap penanganan bencana yang baik melalui pengerahan tenaga penanganan bencana secara terkoordinir yang melampaui perencanaan karena adanya peningkatan jumlah kejadian bencana yang berpengaruh pada meningkatnya respon cepat pada kejadian bencana secara signifikan.
2. Dengan meningkatnya jumlah kejadian bencana melebihi target perkiraan

kejadiannya, berpengaruh pada peningkatan jumlah pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana.

3. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana melebihi dari target yang ditentukan karena adanya peningkatan jumlah orang yang ditolong akibat terdampak bencana khususnya bencana tanah longsor sehingga berpengaruh pada meningkatnya logistik yang harus diberikan kepada korban terdampak bencana dan tenaga penanganan bencana.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah dengan adanya beberapa program/kegiatan yang dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berakibat penilaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang melampaui target kinerja yang diharapkan.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d 2025 Kabupaten Magelang**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kegiatan Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan IV Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		100%	103,14%	100,00%	114,92%	114,92%	100%	100%	100%
1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		100%	103,14%	100,00%	114,92%	<b>114,92%</b>	100%	100%	100%
1	05	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		100%	99,97%	100,00%	99,65%	<b>99,65%</b>	100%	100%	100%
1	05	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		100%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	100%	100%	100%
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4 dokumen LKJP, LKJIP, LPPD dan Pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	4 laporan	4 laporan	100,00%	16 Laporan	16 Laporan	100%
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	4 Laporan	4 laporan	4 laporan	100,00%	4 Laporan	4 laporan	100%

1	0	0	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		11 kegiatan	11 Kegiatan	12 Kegiatan	98,61%	<b>98,61%</b>	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%
1	0	0	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	24 Orang/bulan	24 orang/bulan	23 orang/bulan	95,83%	29 Orang/bulan	27 Orang/bulan	93,10%
1	0	0	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11 kegiatan yang dikelola, 12 dokumen laporan pertanggung jawaban yang disusun dan 1 laporan keuangan yang tersusun	12 dokumen laporan pertanggung jawaban yang disusun	12 dokumen laporan pertanggung jawaban yang disusun	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1	0	0	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/a	N/a	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	N/a	N/a	N/a
1	0	0	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		5 dokumen	1 jenis	4 laporan	100,00%	<b>100,00%</b>	4 Laporan	4 Laporan	100%
1	0	0	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	100,00%	4 Laporan	4 laporan	100%
1	0	0	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		1 dokumen	26 dokumen	1 dokumen	100,00%	<b>100,00%</b>	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
1	0	0	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	26 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 dokumen	100 %
1	0	0	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		7 jenis	7 jenis	4 jenis	100,00%	<b>100,00%</b>	4 Jenis	4 Jenis	100%
1	0	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%
1	0	0	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 paket Peralatan Rumah Tangga	2 paket Peralatan Rumah Tangga	2 paket Peralatan Rumah Tangga	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%

1	0	0	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	48 laporan	128 laporan	128 laporan	100,00%	12 Laporan	12 laporan	100%
1	0	0	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5 Dokumen	7 dokumen	dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	0	0	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		2 paket	N/a	2 paket	100,00%	<b>100%</b>	N/a	N/a	N/a
1	0	0	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	1 unit	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
1	0	0	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	N/a	2 unit	2 unit	100,00%	N/a	N/a	N/a
1	0	0	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	N/a	4 unit	4 unit	100,00%	N/a	N/a	N/a
1	0	0	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			4 jenis	2 jenis	100,00%	100,00%	2 jenis	2 jenis	100%
1	0	0	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4069 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1	0	0	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1	0	0	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00%	100,00%	3 jenis	3 jenis	100%
1	0	0	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	25 Unit	23 unit	23 unit	100,00%	23 Unit	23 Unit	100%
1	0	0	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/a	24 unit	13 unit	13 unit	100,00%	N/a	-Na	Na
1	0	0	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	80 Unit	75 unit	75 unit	100,00%	75 Unit	75 Unit	100%
1	0	0	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 unit	5 unit	5 unit	100,00%	5 Unit	5 Unit	100%
1	0	0			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		100%	104,45%	100,00%	130,18%	<b>130,18%</b>	100%	125,65%	125,65%

1	0	0	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		100%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	100%	100%	100%
1	0	0	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	N/a	N/a	100,00%	N/a	N/a	N/a
1	0	0	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	660 Orang	880 Orang	875 Orang	875 Orang	100,00%	1250 Orang	1250 Orang	100%
1	0	0	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		100%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	100%	100%	100%
1	0	0	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dsn kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan Yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
1	0	0	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kab/Kota	Jumlah personal TRC ysg dikembangkan kapasitas teknis dan managerialnya	N/a	26 orang	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
1	0	0	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	2 dokumen	N/a	N/a	N/a	N/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	0	0	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	N/a	N/a	25 orang	25 orag	100,00%	N/a	N/a	N/a
1	0	0	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan (RPKB) Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	N/a	N/a	N/a	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	0	0	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana(RPB) Kabupaten/Kota samapi dengan dinyatakan sah / legal	1 dokumen	N/a	N/a	N/a	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	0	0	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	N/a	8 unit	N/a	N/a	N/a	NA	NA	NA
1	0	0	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	N/a	N/a	20 Orang	20 Orang	N/a	NA	NA	NA



1	0 5	0 3	2.04	0011	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
1	0 5	0 3	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	-100%
1	0 5	0 3	2.04	0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan.	1 Kegiatan	1 dokumen,1 kali	N/a	N/a	N/a	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang lebih dari 100% yaitu **112,82%** walaupun Wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas dan merupakan daerah rawan bencana yang tersebar di 21 kecamatan. Kabupaten Magelang merupakan supermarketnya bencana dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Magelang kecuali bencana Tsunami.

Masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Magelang memiliki Perda no. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan Rincian Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang dan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang telah disusun pada Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang, Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Magelang dan Dokumen Rencana Kontinjensi tiap jenis bencana baru disusun di tahun 2025. Pada tahun 2025 telah disusun Dokumen Rencana Kontinjensi bencana tanah longsor dan cuaca ekstrim sedangkan pada tahun 2026 akan disusun Dokumen Rencana Kontinjensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Untuk Dokumen Rencana Kontinjensi tiap jenis bencana yang seharusnya ada 8 jenis bencana namun sampai dengan tahun 2026 baru tersusun 4 sehingga masih kurang 4 Dokumen Rencana Kontinjensi tiap jenis bencana.

Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Magelang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Magelang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, BNPB maupun dana masyarakat terutama CSR dari dunia usaha.

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2021 sebesar **100%** termasuk dalam kategori **sangat tinggi** sesuai tabel 2.2. Untuk target 2025-2029 sesuai dengan SPM dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Proyeksi	Catatan Analisis	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Cakupan ketangguhan Daerah menghadapi bencana			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	114,92	112,82					100,00		
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						SPM
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						SPM
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						SPM





### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD adalah sesuai dengan motto BPBD Kabupaten Magelang yaitu *“cepat, tepat, menyentuh hati masyarakat”*.

Dalam pelaksanaan penanganan kejadian bencana, BPBD Kabupaten Magelang selalu menjalin kerjasama dengan instansi terkait, 10 sektor penanggulangan bencana, masyarakat dan dunia usaha walaupun belum maksimal. Koordinasi dan kerja sama yang baik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak saling tumpang tindih.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana, yang disebabkan oleh beberapa hal :
  - a. Belum optimalnya pendidikan dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat di sebagian besar satuan pendidikan yang disebabkan oleh belum semua menerapkan satuan pendidikan aman bencana.
  - b. Belum optimalnya implementasi program ketangguhan masyarakat yang disebabkan oleh: (1) program ketangguhan masyarakat belum terintegrasi dan menjadi prioritas desa; dan (2) belum adanya data terintegrasi dari kegiatan ketangguhan masyarakat dari seluruh pihak (pemerintah dan non pemerintah).
  - c. Belum optimalnya penggunaan dana desa untuk program ketangguhan bencana masyarakat desa;
  - d. Belum optimalnya pelibatan kelompok rentan;
  - e. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di sebagian besar desa rawan bencana Kabupaten Magelang.
2. Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan sistem peringatan dini oleh masyarakat dan aparat pemerintah.
3. Belum optimalnya penanggulangan kedaruratan bencana :
  - a. Terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
  - b. Kurang optimalnya koordinasi multisektor dalam penerapan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) pada saat darurat bencana;

- c. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang;
  - d. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang;
  - e. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.
4. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang.

Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota memuat 3 indikator yaitu Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD yang dihadapi BPBD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam penanganan bencana adalah :

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Memastikan semua pejabat dan staf mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana serta memenuhi kuota standar 94 personil
2. Digitalisasi Sistem: Mengintegrasikan mekanisme pelaporan dan pendataan ke tingkat Provinsi dan Pusat melalui sistem informasi yang terprogram
3. Ketersediaan Anggaran Khusus: Adanya urgensi penyediaan Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola langsung di BPBD agar penanganan lebih cepat
4. Infrastruktur Fisik: Penyediaan tempat pengungsian dan jalur evakuasi yang memadai di seluruh titik rawan

Selain itu, sebagai upaya peningkatan pelayanan Perangkat Daerah (PD), BPBD Kabupaten Magelang senantiasa memanfaatkan peluang strategis yang tersedia untuk memperkuat resiliensi daerah. Adapun peluang tersebut yaitu :

1. Aspek Legalitas (Payung Hukum): Adanya Peraturan Bupati terkait Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) hingga Rencana Kontinjensi sebagai dasar operasional yang kuat;
2. Pemberdayaan Masyarakat: Potensi besar dari seluruh desa di Magelang untuk menjadi Desa Tangguh Bencana (DESTANA);

3. Sinergi Multi-Sektor: Keterlibatan aktif dunia usaha dan masyarakat serta koordinasi 10 sektor dalam siklus pra, saat, dan pasca bencana;
4. Peran aktif Relawan : Kabupaten Magelang memiliki relawan lebih dari 4.000 yang terdaftar secara sah di berbagai organisasi penanggulangan bencana.

Dalam penanggulangan bencana saat ini tidak hanya melibatkan 3 peran yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha saja tetapi ditambahkan dengan peran perguruan tinggi dan media untuk berbagi peran dalam penanggulangan bencana (pentahelix).

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2027 adalah :

1. Rendahnya kapasitas bagi aparatur, pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Penanganan bencana menggunakan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus untuk desa.
3. Mensukseskan program prioritas Bupati Magelang yang tertuang dalam Renstra Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.
4. Mensinergikan dengan isu strategis Penanggulangan Bencana Nasional 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan BNPB No 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029 yaitu :
  - a. Meningkatnya Risiko dan potensi dampak bencana geologi;
  - b. Meningkatnya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim;
  - c. Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi;
  - d. Potensi Kejadian Konflik Sosial;
  - e. Belum Optimalnya Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana;
  - f. Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak, a) Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif “Pentahelix” yaitu kolaborasi antar unsur Pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa; b) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana ; c) Panglima TNI dan

KAPOLRI untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum.

- g. Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan;
  - h. Kebutuhan Penguatan Kepemimpinan dan Peran Strategis Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Global.
5. Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak bagi korban bencana oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
  6. Belum optimalnya pengurangan resiko bencana di Kabupaten Magelang. Tingginya tingkat kejadian dan kerentanan bencana kurang sebanding dengan kapasitas masyarakat atau lembaga pemerintah. Masyarakat kurang responsif dalam kesiapsiagaan terhadap bencana. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah juga belum memenuhi standar universal, seperti kurangnya jalur evakuasi untuk masyarakat dan penyandang disabilitas di bangunan-bangunan penting.
  7. Bencana kekeringan, krisis air, banjir, dan perubahan iklim (el nino) berpengaruh pada tingginya angka kehilangan produksi di Kabupaten Magelang.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong, Indonesia meletakkan pembangunan berkelanjutan sebagai pilar utama. Esensi dari pembangunan ini hanya dapat dicapai melalui perwujudan Indonesia Tangguh Bencana. Sebuah visi besar di mana ketahanan bukan sekadar slogan, melainkan budaya yang meresap hingga unit terkecil masyarakat.

Indonesia yang tangguh adalah sebuah ekosistem di mana keluarga, desa, hingga pemerintah pusat berdiri sebagai satu kesatuan yang sadar risiko bencana, berbekal pengetahuan manajemen bencana yang mumpuni, serta memiliki ketangkasan dalam merespon darurat. Lebih dari sekadar bertahan, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan pemulihan lebih kuat (*Build Back Better*), menciptakan ruang hidup yang lebih aman dan berkelanjutan di masa depan. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu:

1. Memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana.
2. Melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat.
3. Melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

Meskipun komitmen Nasional telah terbentuk, jalur menuju ketangguhan secara sistemik masih menghadapi tantangan fundamental. Secara internal, kapasitas institusional dan kinerja aparat perlu diakselerasi agar sejalan dengan kompleksitas ancaman bencana. Namun, Upaya penanggulangan bencana harus tetap dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Dalam pelaksanaannya tentu masih terdapat kendala masalah utama, yaitu:

1. **Optimalisasi Kapasitas Kelembagaan:** Belum maksimalnya performa aparaturnya dan sinkronisasi kelembagaan dalam sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi.

2. **Transformasi Budaya Sadar Risiko:** Urgensi penguatan literasi publik terhadap risiko bencana serta internalisasi budaya kesiapsiagaan yang lebih mendalam di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang prima, terdapat sejumlah tantangan fundamental yang menjadi fokus perhatian:

1. **Harmonisasi Regulasi dan Sektoral:** Belum optimalnya integrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007, khususnya dalam menyinkronkan kewenangan strategis antar Kementerian/Lembaga di luar BNPB.
2. **Akselerasi Implementasi Rencana Nasional:** Urgensi penguatan implementasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang menuntut keseimbangan dan kesinambungan antara fase mitigasi, kesiapsiagaan (*preparedness*), respon cepat (*response*), hingga pemulihan (*recovery*).
3. **Optimalisasi Dukungan Anggaran:** Keterbatasan alokasi fiskal pada unit kerja Kementerian/Lembaga yang belum proporsional dengan skala kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Nasional.
4. **Eskalasi Ancaman Perubahan Iklim:** Dinamika perubahan iklim global yang memicu peningkatan frekuensi serta intensitas bencana alam, menuntut strategi adaptasi yang lebih kompleks.
5. **Kesenjangan Infrastruktur Teknologi Informasi:** Keterbatasan sarana komunikasi dan konektivitas di berbagai daerah yang menghambat akselerasi pertukaran data serta informasi real-time antara pusat dan daerah.
6. **Kompleksitas Geografis dan Multi-Risiko:** Luasnya cakupan wilayah administratif Indonesia yang memiliki karakteristik kerawanan bencana yang sangat beragam, memerlukan pendekatan penanganan yang spesifik dan terdesentralisasi.

Dalam mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bencana pada tingkat Nasional, perlu adanya Optimalisasi Peluang dan modalitas strategis, antara lain:

1. **Konsensus dan Komitmen Kolektif Nasional:** Adanya komitmen kuat dari seluruh komponen pemerintah, swasta, dan sipil sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu.
2. **Akselerasi Transformasi Digital:** Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi

dan komunikasi mutakhir untuk memperkuat instrumen mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

3. **Sinergisitas Tata Kelola Antar Tingkat Pemerintahan:** Terjalannya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi yang harmonis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) guna memastikan koherensi penanganan bencana di lapangan.
4. **Kemitraan Strategis Global dan Lokal:** Adanya ruang kolaborasi yang luas serta kontribusi aktif dari masyarakat, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik berskala nasional maupun internasional dalam memperkuat resiliensi berkelanjutan.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki berbagai modalitas strategis yang apabila dioptimalkan secara komprehensif, akan menjadi katalisator utama dalam memperkuat kapasitas urusan pemerintahan dalam negeri selaras dengan pencapaian tujuan nasional.

Program Bina Administrasi Kewilayahan Dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara, serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat yang mencakup pencegahan dan penganggulangan bencana serta bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu: Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Program ini dijabarkan ke dalam Kegiatan, yaitu: Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 2 Tahun 2012 menetapkan Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana sebagai pedoman bagi instansi pemerintah, khususnya di tingkat daerah, dalam melakukan pengkajian risiko bencana. Tujuan utama dari pedoman ini adalah untuk memberikan arahan dan standar dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan risiko bencana yang dapat terjadi di suatu wilayah.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan instrumen strategis yang menjadi tolok ukur efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Melalui parameter yang komprehensif, IRBI memfasilitasi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam memetakan kerentanan serta memproyeksi dampak bencana secara presisi. Dengan mengintegrasikan faktor geografis, demografis, kesiapan infrastruktur, hingga kondisi sosial-ekonomi. Indeks ini menjadi landasan kuat dalam perumusan kebijakan mitigasi yang lebih tepat sasaran dan berdampak luas. Implementasi IRBI dirancang untuk menjadi navigasi strategis bagi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan wilayah. Secara sistematis, tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Pemahaman:** Membangun pemahaman yang lebih baik tentang risiko bencana di masyarakat dan Pemerintah Daerah.
2. **Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data:** Memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan mitigasi bencana.
3. **Integrasi dalam Rencana Pembangunan:** Mengintegrasikan hasil pengkajian risiko bencana ke dalam rencana pembangunan dan kebijakan daerah.

Selanjutnya dalam upaya menghasilkan profil risiko yang akurat dan aplikatif, proses pengkajian dilakukan secara komprehensif melalui tahapan berikut:

1. **Identifikasi Bahaya (*Hazard Identification*):** Melakukan inventarisasi dan karakterisasi seluruh potensi ancaman bencana yang melekat pada suatu wilayah seperti aktivitas seismik (gempa bumi), hidrometeorologi (banjir dan longsor), hingga ancaman geologi lainnya guna memahami tipologi ancaman secara spesifik.
2. **Penilaian Kerentanan (*Vulnerability Assessment*):** Menganalisis tingkat kerentanan elemen-elemen terpapar (*exposed elements*), yang mencakup aspek populasi, infrastruktur vital, serta ekosistem lingkungan. Tahapan ini meninjau variabel sosial, ekonomi, dan fisik yang dapat memperlemah atau memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi guncangan bencana
3. **Analisis Risiko (*Risk Analysis*):** Melakukan kalkulasi saintifik untuk mengukur probabilitas terjadinya bencana serta memproyeksi estimasi dampaknya. Hal ini mencakup kuantifikasi potensi kerugian, baik secara

jiwa, materiel, maupun kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan pada tiap jenis bencana.

4. **Pemetaan Risiko (*Risk Mapping*):** Visualisasi data ke dalam peta risiko bencana yang komprehensif untuk menggambarkan zonasi tingkat risiko (tinggi, sedang, dan rendah). Peta ini berfungsi sebagai instrumen krusial dalam perencanaan tata ruang dan penyusunan strategi mitigasi berbasis kewilayahan.
5. **Diseminasi dan Pelaporan Informasi:** Mengomunikasikan hasil kajian secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif serta memastikan kebijakan mitigasi yang diambil didasarkan pada pemahaman risiko yang selaras di semua lini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melalui sinergi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah, telah berhasil membangun fondasi **Sistem Nasional Penanggulangan Bencana** yang kokoh. Penguatan ini mencakup lima pilar utama: aspek legislasi yang komprehensif, penguatan kelembagaan, perencanaan yang terintegrasi, skema pendanaan yang akuntabel, serta eskalasi kapasitas sumber daya manusia.

Namun, di tengah kemajuan tersebut, terdapat dua tantangan fundamental yang menjadi agenda prioritas ke depan:

- a. **Transformasi Budaya Sadar Risiko:** Akselerasi strategi untuk menumbuhkan pemahaman mendalam dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap risiko bencana, guna mentransformasi perilaku reaktif menjadi budaya kesiapsiagaan yang proaktif dan berkelanjutan.
- b. **Optimalisasi Kinerja dan Sumber Daya:** Peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif, dan terintegrasi untuk menjamin respon yang lebih presisi dan berdampak luas.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan Renja PD Tahun 2027 adalah meningkatnya kapasitas daerah dan pelayanan kebencanaan yang berkualitas. Sedangkan sasaran Renja PD adalah meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dengan indikator cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana. Hal tersebut sesuai dengan sasaran target kinerja Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

### 3.3. Program dan Kegiatan Penunjang Prioritas Bupati

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang sesuai dengan **RPJMD Tahun 2025-2029**, BPBD Kabupaten Magelang menyelaraskan seluruh program kerjanya demi mewujudkan **'Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera (Magelang Anyar Gress)'**. Dengan mengusung Misi Panca Dharma :

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Sebagai institusi yang menjadi garda terdepan dalam perlindungan masyarakat pada sub-urusan kebencanaan, BPBD menerjemahkan Misi **Panca Dharma** ke dalam aksi nyata yang terukur yaitu meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Selain itu Bupati Magelang memiliki Program unggulan Sapta Cipta, yang berfokus pada :

1. Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocahe
2. Sehat Wargane
3. Makmur Rakyat
4. Gemilang Potensine
5. Ngelayani Birokrasine
6. Gumregah Wargane
7. Lestari Alam

Fokus utama BPBD Kabupaten Magelang adalah mendukung program unggulan **Sapta Cipta**, dengan titik berat pada Program Unggulan ke 7 yaitu **Lestari Alam**: Melalui penguatan Desa Tangguh bencana, pengerahan relawan dan pelestarian lingkungan.

Sementara itu, terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui delapan

misi pembangunan yang terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Delapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Keseimbangan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas melalui kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan yang efektif.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang mengacu pada Resntra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan nasional. Program dan kegiatan pada BPBD masuk dalam tujuan kelima yaitu Meningkatkan Ketahanan dan Efektivitas Manajemen Bencana dengan sasaran Meningkatkan kapasitas daerah dan pelayanan kebencanaan yang berkualitas.

Dalam upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, BPBD Kabupaten Magelang berakselerasi melalui Program yaitu menetapkan penanggulangan bencana sebagai prioritas strategis. Fokus utama diarahkan pada Penguatan Ekosistem Kelembagaan yang mencakup modernisasi regulasi (legislasi), penguatan struktur organisasi, serta optimalisasi skema pendanaan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan Program tersebut, langkah-langkah strategis dijabarkan dan diarahkan pada kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota, Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dalam pembentukan (DESTANA) Desa Tangguh Bencana, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota serta Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana. Fokus prioritas ini diampu oleh BPBD melalui program Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BPBD Kabupaten Magelang telah menyusun Renja Tahun 2027 sebagaimana pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2027 sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp			
<b>Meningkatkan kapasitas daerah dan pelayanan kebencanaan yang berkualitas</b>												
<b>Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana</b>												
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana, dan Persentase Penanganan Tanggap darurat bencana	100 persen	100 persen	2.138.703.095	100 persen	1.693.964.519	100 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kabupaten Magelang	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									

				Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 Persen	100 Persen	67.720.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
				Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen	761.740.795	100 Persen	579.964.519	100 Persen	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen	1.205.000.000	100 Persen	1.070.000.000	100 Persen	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
				Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	104.242.300	100 Persen	19.000.000	100 Persen	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
<b>Meningkatkan kapasitas daerah dan pelayanan kebencanaan yang berkualitas</b>												
<b>Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana</b>												
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	4.737.771.000	100 Persen	4.719.571.000	100 Persen	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

			Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	961.035.620	100 Persen	402.299.000	100 Persen	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan erangkat Daerah	44 dokumen	44 dokumen	53.601.000	44 dokumen	50.751.000	44 dokumen	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
			Jumlah kegiatan yang dikelola	11 Kegiatan	11 Kegiatan	4.684.170.000	11 Kegiatan	4.668.820.000	11 Kegiatan	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
			Jumlah aset yang dikelola	8 Dokumen	2.546 unit	1.680.000	2.546 unit	750.000	2.546 unit	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
			Jumlah ASN yang terlayani kepegawaiannya	26 Dokumen	64 orang	2.500.000	64 orang	750.000	64 orang	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

			Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	7 jenis	4 layanan	188.857.000	4 layanan	18.050.000	4 layanan	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
			Jumlah paket pengadaan	2 Paket	2 Paket	00	2 Paket	00	2 Paket	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan	4 Jenis	4 Jenis	80.000.000	4 Jenis	76.000.000	4 Jenis	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	1.245 unit	688.000.000	1.245 unit	306.749.000	4 Jenis 1.245 unit	BADAN PEN ANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2027. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah **Meningkatnya kapasitas daerah dan pelayanan kebencanaan yang berkualitas**, dengan strategi peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana Kabupaten Magelang disusun atas dasar regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana.

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya untuk Tahun 2027 sesuai dengan RPJMD 2025-2029 adalah sebesar **Rp.6.815.834.519,00**. 2 program 11 kegiatan dan 27 subkegiatan 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Magelang dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Magelang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	7	8	9	14	15	16	17
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				<b>6.815.834.519,00</b>			<b>7.169.922.522,00</b>	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>6.815.834.519,00</b>			<b>7.169.922.522,00</b>	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>6.815.834.519,00</b>			<b>7.169.922.522,00</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	<i>Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah</i>		<b>100 persen</b>	<b>5.121.870.000,00</b>		<b>-</b>	<b>5.124.620.000,00</b>	

	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								
	[ Tercapainya Layanan Perencanaan evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah ]	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b> <b>Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.121.870.000,00</b>	-	-	<b>5.124.620.000,00</b>	-
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		44 dokumen	50.751.000,00	-	-	50.751.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		9 Dokumen	20.417.000,00	-		20.417.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		34 Laporan	30.334.000,00	-		30.334.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan yang disusun</i>		14 Laporan	4.668.820.000,00	Pegawai BPBD	-	4.668.820.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		33 Orang/bulan	4.647.820.000,00	Pegawai BPBD		4.647.820.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

									DAERAH
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		45 Dokumen	21.000.000,00	Pegawai BPBD		21.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah aset yang dikelola</i>		2526 Unit	750.000,00	BMD BPBD	-	1.750.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>		5 Laporan	750.000,00	BMD BPBD		1.750.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya</i>		33 Orang	750.000,00	Pegawai BPBD	-	1.750.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		1 Dokumen	750.000,00	Pegawai BPBD		1.750.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</i>		4 layanan	18.050.000,00	BPBD	-	21.050.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket	750.000,00	BPBD		2.750.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>		1 Paket	1.000.000,00	BPBD		1.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		4 Laporan	15.000.000,00	BPBD		16.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		4 Dokumen	1.300.000,00	BPBD		1.300.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	0,00	-	-	0,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		0 Unit	0,00	-		0,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>		2 layanan	76.000.000,00	-	-	76.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA

									DAERAH
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		12 Laporan	1.000.000,00	-		1.000.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		36 Laporan	75.000.000,00	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>		2489 Unit	306.749.000,00	BMD BPBD	-	304.499.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		23 Unit	161.000.000,00	BMD BPBD		161.000.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		75 Unit	37.500.000,00	BMD BPBD		37.500.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		5 Unit	108.249.000,00	BMD BPBD		105.999.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	-		-	<b>1.693.964.519,00</b>		-	<b>2.045.302.522,00</b>	
	<b>[ Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ]</b>	<b>Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.693.964.519,00</b>	-	-	<b>2.045.302.522,00</b>	-
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelayanan Informasi rawan bencana</i>		100 persen	25.000.000,00	warga /masyarakat di daerah rawan bencana	-	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
		<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>		80 Orang	25.000.000,00	warga /masyarakat di daerah rawan bencana		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>		1 Dokumen	0,00	warga /masyarakat di daerah rawan bencana		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Persentase pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>		100 persen	579.964.519,00	warga /masyarakat Kab. Magelang	-	901.302.522,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani</i>		2 Kegiatan	22.000.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		22.000.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
		<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>		1 Unit	0,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		0,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
		<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>		84 Orang	0,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		27.000.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
		<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>		1 Kawasan	84.500.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		110.500.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas</i>		0 Orang	0,00	warga /masyarakat Kab.		82.000.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA

		sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				Magelang			DAERAH
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		2 Dokumen	213.464.519,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		202.704.854,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		12 laporan	260.000.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		260.000.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
	-	-	-	-	1.693.964.519,00	-	-	2.045.302.522,00	-
1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		0 Orang	0,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		197.097.668,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
	[ Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat ]	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	1.693.964.519,00	-	-	2.045.302.522,00	-
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 persen	1.070.000.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang	-	1.070.000.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								

		<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>		2 Dokumen	230.000.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		230.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>		750 Orang	520.000.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		520.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>		1552 Orang	320.000.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		320.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	<b>[ Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana ]</b>	<b>Persentase Penanganan pasca Bencana</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.693.964.519,00</b>	-	-	<b>2.045.302.522,00</b>	-
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>Persentase penataan sistem dasar Penanggulangan Bencana</i>		100 persen	19.000.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang	-	49.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>		1 Dokumen	5.000.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		15.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai</i>		1 Kegiatan	7.000.000,00	warga /masyarakat		10.000.000,00	BADAN PENANGGULAN

		<i>berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan</i>				Kab. Magelang			GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal</i>		2 Lembaga	0,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		15.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota								
		<i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>		1 Dokumen	5.000.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		5.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>		1 Dokumen	2.000.000,00	warga /masyarakat Kab. Magelang		4.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
<b>J U M L A H</b>					<b>6.815.834.519,00</b>			<b>7.169.922.522,00</b>	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2027 merupakan bagian integral dari tahapan pembangunan lima tahunan yang berfungsi sebagai instrumen operasional tahunan. Dokumen ini merepresentasikan komitmen strategis BPBD dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi organisasi ke dalam serangkaian program kerja yang terukur dan terarah.

Penyusunan Renja Tahun 2027 dilakukan dengan prinsip prudensial dan responsif, di mana alokasi program diselaraskan dengan kebutuhan riil di lapangan serta ketersediaan anggaran daerah. Dalam implementasinya, dokumen ini akan tetap berpijak pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

Melalui perencanaan yang matang, Renja BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kinerja instansi yang lebih efektif, efisien, dan optimal. Seluruh upaya ini bermuara pada satu tujuan utama, yaitu mewujudkan ketangguhan bencana dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 5 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG,



EDI WASONO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196806091993031004